



**RENCANA STRATEGIK  
( RENSTRA )**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA  
2013-2017**

**Mulia, 2013**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )**

*Jalan Papua Nomor 01, Pagaleme, Distrik Mulia, Telp/Fex : 0411-402611*

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Landasan Hukum .....	3
D. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	3
E. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN PUNCAK JAYA</b>	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.....	5
B. Kinerja Pelayanan SKPD Selama ini .....	8
C. Analisis Keuangan SKPD .....	9
D. Analisis Lingkungan Internal .....	10
E. Analisis Lingkungan Eksternal .....	11
F. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan .....	11
G. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan .....	12
<b>BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
A. Visi Bappeda Kabupaten Puncak Jaya.....	14
B. Misi Bappeda Kabupaten Puncak Jaya.....	14
C. Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD .....	15
<b>BAB IV : STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
A. Strategi .....	17
B. Arah Kebijakan .....	17
<b>BAB V : PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN INDIKATIF</b>	
A. Program.....	19
B. Target Indikatif .....	19
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya lima tahun kedepan diarahkan kepada perwujudan Kabupaten Puncak Jaya yang semakin mandiri, maju, dan sejahtera yang didukung nilai agama dan budaya dengan tata pemerintahan yang baik, yaitu ;

1. Kabupaten yang kehidupan masyarakatnya semakin sehat jasmani dan rohaninya, serta cerdas agar dengan kemampuannya sendiri dapat bangkit dan menjadi unggul di segala bidang kehidupannya.
2. Kabupaten yang kehidupan masyarakatnya semakin maju, dengan mempertahankan nilai-nilai religious-agamis dan nilai budaya yang positif, serta memiliki kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin dan berdaya tahan sehingga mampu untuk mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Puncak Jaya.
3. Kabupaten yang masyarakatnya semakin terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya serta kebutuhan sandang, pangan dan papan dengan kemampuan sendiri.

Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses menejemen maupun sebagai sebuah kebijakan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Puncak Jaya adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung

formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan pembangunan lebih baik yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula .

Dalam kaitannya dengan itu, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka dengan sendirinya Bappeda mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Bappeda dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Puncak Jaya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya. Sebagai pedoman umum yang berlaku secara internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisikan arahan makro tentang segala hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal organisasi Bappeda. Karena itu agar dapat diimplementasikan secara nyata, selanjutnya harus diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk Rencana

Kegiatan Tahunan oleh masing-masing kepala unit dan sub unit kerja dilingkungan internal Bappeda.

## **2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana strategis ini adalah untuk :

- a. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf didalam memberikan yang terbaik bagi bappeda Kabupaten Puncak Jaya agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.
- b. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama.
- c. Memperbesar kontribusi Bappeda didalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan berkeadilan.

## **C. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Puncak Jaya tahun 2007-2012 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Puncak Jaya
7. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017.
8. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 81 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

#### D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

Renstra Bappeda pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Bappeda sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Bappeda terhadap ***apa yang harus dilakukan oleh Bappeda*** agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam konteks seperti itulah, secara substansial Renstra Bappeda dipandang sangat layak untuk diposisikan sebagai gambaran kasar tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang sehingga wajar jika substansinya seringkali dijadikan rujukan oleh SKPD lain. Hal demikian dilakukan semata-mata dengan tujuan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam menterjemahkan RPJMD kedalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab unit kerja masing-masing. Jadi, Renstra Bappeda tidak lain adalah sama-sama merupakan terjemahan RPJMD seperti halnya Renstra SKPD lainnya, sehingga antara keduanya tidak terdapat hubungan hirarkies, tetapi satu sama lain saling mengisi dan melengkapi sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Dokumen Renstra Bappeda di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Renstra Bappeda dengan dokumen perencanaan lainnya.
- E. Sistematika Penulisan.

### **BAB II. Gambaran Umum**

- A. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- B. Kinerja Pelayanan SKPD saat ini
- C. Analisis Keuangan SKPD
- D. Analisis Lingkungan Internal
- E. Analisis Lingkungan Eksternal
- F. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan
- G. Faktor Kunci Keberhasilan

### **BAB III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

- A. Visi SKPD
- B. Misi SKPD
- C. Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD

### **BAB IV. Strategis dan Kebijakan**

- A. Strategi
- B. Arah Kebijakan

### **BAB V. Program dan Kegiatan Bappeda**

### **BAB VI. Penutup**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**BAPPEDA KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Secara umum kondisi internal dan eksternal Bappeda Kabupaten Puncak Jaya cukup kondusif walaupun masih sering terjadi gejolak masalah stabilitas keamanan daerah, sehingga memberikan dampak yang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Hal demikian diindikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi masyarakat didalam mendukung penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat.

Secara umum, perkembangan dimaksud dapat cermati dari beberapa hal sebagai berikut :

**A. Tugas Pokok & Fungsi Bappeda**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Puncak Jaya, sebagaimana yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 81 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak Jaya, mengatur tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai berikut :

**1. Tugas Pokok :**

Membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik, lingkungan hidup dan penanaman modal serta kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Fungsi :**



- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, litbang statistik, Lingkungan hidup serta Penanaman Modal;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, litbang statistik, lingkungan hidup serta penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, litbang statistik, lingkungan hidup serta penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, litbang statistik, lingkungan hidup serta penanaman modal;
- e. Pembinaan tugas di bidang dan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Rincian Tugas :**

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Memberikan petunjuk kepada staf tentang konsep umum, rancangan perencanaan pembangunan daerah, dan rancangan perencanaan lainnya;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah dengan para pimpinan unit kerja;
- e. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pembangunan daerah;

- f. Mengkoordinasikan konsep-konsep RAPBD khususnya Belanja Pembangunan dan pembahasan hingga pada penetapan menjadi APBD dengan para pimpinan unit kerja;
- g. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program penelitian pembangunan daerah dan melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Mengkoordinasikan konsep hasil penelitian pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pembangunan daerah dan memberikan bimbingan pengelolaan administrasi umum atau melakukan pembinaan atas kedisiplinan dan peningkatan kualitas SDM aparat;
- j. Mensinergikan potensi staf untuk dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah dan Memberikan pertimbangan dan telaahan staf kepada Bupati secara berjenjang, mengenai rencana pembangunan daerah dan perencanaan lainnya;
- k. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan perlengkapan/peralatan badan;
- l. Menilai prestasi kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

#### **4. Struktur Organisasi dan SDM**

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Puncak Jaya tersebut, maka susunan struktur dan organisasi Bappeda Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Program;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Fisik dan Prasarana :
  - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
  - 2. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Pengairan.

- d. Bidang Ekonomi :
  - 1. Sub Bidang Pertanian;
  - 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi.
- e. Bidang Sosial Budaya :
  - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum.
- f. Bidang Litbang dan Statistik :
  - 1. Sub Bidang Penelitian pengembangan;
  - 2. Sub Bidang Statistik dan pelaporan.
- g. Bidang Lingkungan Hidup
  - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan;
  - 2. Sub Bidang Pemantauan Lingkungan dan Konservasi SDA.
- h. Bidang Penanaman Modal :
  - 1. Sub Bidang Promosi Investasi;
  - 2. Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian Investasi.

Bagan/Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Puncak Jaya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

## **5. Sistem dan Prosedur Tata Kerja**

Sebagai lembaga perencana, Bappeda memiliki sistem dan prosedur tata kerja yang secara umum sama dengan Instansi Pemerintah lainnya pada jajaran Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, namun secara teknis / khusus memiliki ciri khas tersendiri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kekhususan dalam sistem dan prosedur kerja Bappeda meliputi hal-hal lain sebagai berikut :

- a. Sebagai aparat perencana, secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan sebagai pelayan bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah yang bersifat operasional bertanggung jawab kepada Bupati;
- b. Seluruh staf Bappeda bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dan selanjutnya Kepala Sub

Bidang/Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris/Kepala Bidang dan selanjutnya Sekretaris/Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- c. Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bappeda diatur secara berjenjang dari kepala badan kepada sekretaris/kabid kemudian kepada Kasubbag/kasubbid dan turun kepada staf, dan juga dalam hal perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan disampaikan keatas secara berjenjang pula.

Masih banyak tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan sistem dan prosedur kerja Bappeda, namun hanya hal-hal utama yang dijabarkan sebagai dasar penyusunan rencana strategis, dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta sebagai bahan dalam mengevaluasi penyusunan laporan.

## **B. Kinerja Pelayanan SKPD saat Ini**

Bappeda Kabupaten Puncak Jaya selaku lembaga perencana dan pengendali pembangunan dalam merealisasikan seluruh kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya maka telah melaksanakan tugas aparatur lainnya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi perencanaan program tahunan dengan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.
2. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Distrik di Kabupaten Puncak Jaya.
3. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten Puncak Jaya.
4. Mengikuti Musrenbang Tingkat Provinsi.
5. Mengikuti Musrenbang Tingkat Nasional.
6. Penyusunan RKA & DPA SKPD
7. Pengesahan RKA & DPA SKPD
8. Menyusun Rekapitulasi laporan bulanan Kegiatan Belanja Langsung.
9. Melaksanakan Monitoring Meja dan Lapangan bagi Kegiatan Belanja Langsung.
10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Puncak Jaya.

11. Menyusun dan melaksanakan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) serta Strategi dan Prioritas APBD.
12. Melaksanakan Tugas Koordinasi Tata Ruang Daerah.
13. Memberikan Ijin Penelitian baik kepada Lembaga Penelitian maupun Mahasiswa.
14. Bekerja sama dengan BAPPENAS/LKPP dalam rangka pengembangan SDM, Perencanaan dan Bimbingan Teknis/Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

### **C. Analisis Keuangan SKPD**

#### **1. Sumber – Sumber Pembiayaan**

Untuk melaksanakan kegiatan di Bappeda secara rutin tiap tahun maupun untuk lima (5) tahun kedepan, maka sumber pembiayaannya berasal dari :

- Dana Alokasi Umum (DAU),
- Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
- Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sedangkan pembelanjaan rutinnya terbagi atas :

- a. Belanja Tidak Langsung :
  - i. Belanja Pegawai
- b. Belanja Langsung
  - ✚ Belanja Pegawai
  - ✚ Belanja Barang dan Jasa
  - ✚ Belanja Modal

#### **2. Pendapatan**

Bappeda Kabupaten Puncak Jaya tidak memungut SKPD atau collector PAD proses penelitian dokumen kontrak dilakukan pada Bappeda dan selanjutnya administrasi pembayaran langsung ke Dinas Pendapatan Daerah.

### **D. Analisis Lingkungan Internal**

#### **a. Faktor Kekuatan (Strong)**

1. Telah ditetapkan Perda Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor 81 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Bappeda Kabupaten Puncak Jaya. Keputusan Bupati Kabupaten Puncak Jaya ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Bappeda Kabupaten Puncak Jaya.
2. Struktur organisasi pada Bappeda Kabupaten Puncak Jaya telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
3. Pola kerja di Bappeda yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
5. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Bappeda Kabupaten Puncak Jaya.

***b. Faktor Kelemahan (Weakness)***

1. Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian.
2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
5. Belum optimalnya kegiatan pemeliharaan dan pengujian sebagai bahan merumuskan keputusan dalam perencanaan pembangunan.

## **E. Analisis Lingkungan Eksternal**

### ***a. Faktor Peluang ( Opportunity )***

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang sudah tertata dengan baik
2. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kabupaten Puncak Jaya .
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
5. Adanya Komitmen Legislatif dalam mendukung proses pembangunan;

### ***b. Faktor Ancaman ( Threat )***

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
2. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Puncak Jaya .

5. Masih adanya kebijakan yang kadang – kadang tidak berpihak pada masyarakat.

## **F. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Bappeda Kabupaten Puncak Jaya, yaitu :

### **1. Kondisi Yang diinginkan**

- a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Jumlah tenaga teknis perencanaan dan penelitian/pengkajian sesuai dengan kebutuhan.
- c. Data – data pembangunan tersusun secara sistemik dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).
- d. Terwujudnya perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
- e. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
- f. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif.

### **2. Proyeksi Kedepan Bappeda Kabupaten Puncak Jaya**

- a. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- b. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pemantapan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan data – data pembangunan dan penyebaran informasi pembangunan.



## **G. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan**

Berdasarkan analisa lingkungan organisasi, maka asumsi / kesimpulan yang dapat diambil sebagai faktor penentu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan dengan susunan organisasi, tata laksana dan kedudukan yang mengatur tugas pokok dan fungsi Bappeda secara tegas dan jelas.
2. Profesionalisme dan kreatifitas SDM yang ada pada Bappeda Kabupaten Puncak Jaya dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana dan pengontrol proses perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
3. Formulasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan terjadwal secara teratur.
4. Motivasi kerja aparat Bappeda sebagai implementasi dari dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan.
5. Kecukupan dana, sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas kedinasan.
6. Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan akurasi dan validasi data yang diperlukan dalam proses penetapan kebijakan terhadap perencanaan pembangunan daerah.
7. Keleluasaan menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan ditunjang adanya sistem penerapan otonomi daerah.
8. Situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang kondusif sehingga mendukung peran aktifnya dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Kualitas sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan secara periodik dan terukur serta pemanfaatannya untuk perencanaan pembangunan tahap berikutnya.
10. Efektifitas dan efisiensi koordinasi dalam proses penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan daerah.
11. Sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang tertata dengan baik.

## **BAB III**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi SKPD**

***”Terwujudnya Bappeda Puncak Jaya Sebagai Lembaga Perencana Pembangunan Yang Kredibel, Akuntabel dan Profesional”***

##### **Penjelasan Visi:**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Bappeda yaitu mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik serta kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka fungsi Bappeda Mutlak dilaksanakan secara optimal dan akuntabel.

Sejalan dengan itu maka pengertian kata Aspiratif dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- Kredibel : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- Akuntabel : Menerapkan prinsip – prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- Profesional : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan daerah, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

#### **B. Misi SKPD**

Untuk mewujudkan Visi diatas, Bappeda Kabupaten Puncak Jaya telah merumuskan beberapa misi diantaranya adalah :

- a. Membangun data perencanaan yang komprehensif dan Akurat ;

- b. Membangun Sumber Daya Perencanaan yang Profesional dan Bertanggung Jawab;
- c. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif;
- d. Melakukan Pendataan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Akurat dan terkini.

### **C. Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD**

- **Misi I** : Membangun data perencanaan yang komprehensif dan Akurat.

Tujuan dan Sasaran:

- a. Tujuan :

Tersedia dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif.

- b. Sasaran :

- Terlaksananya musrenbang yang terstruktur dan aspiratif;
- Tersusunnya dokumen perencanaan yang insidental.

- **Misi II** : Membangun Sumber Daya Perencanaan yang Profesional dan Bertanggung Jawab.

Tujuan dan Sasaran:

- 1. Tujuan :

Tersedianya sumber daya manusia perencana pembangunan yang handal.

- 2. Sasaran :

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan daerah.

- **Misi III** : Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif.

Tujuan dan Sasaran:

- 1. Tujuan :

Terlaksananya program pembangunan daerah yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat fungsi.

- 2. Sasaran :

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan daerah.

- **Misi IV :** Melakukan Pendataan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Akurat dan terkini.

Tujuan dan Sasaran:

1. Tujuan :

Terlaksananya pendataan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

2. Sasaran : Tersedianya data, hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

## BAB IV

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam penyusunan rencana strategis Bappeda Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017 yang merupakan rencana kerja lima (5) tahun yang akan dituangkan kedalam rencana kerja (Renja) tahunan, maka Bappeda Kabupaten Puncak Jaya menyiapkan sekaligus menerapkan beberapa Strategi maupun Kebijakan perencanaan pembangunan yang dapat duraikan sebagai berikut :

#### A. Strategi

Dengan mengacu kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka dapat dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

- **Strategi 1 adalah :**

Tingkatkan hubungan kerja sama dan koordinasi untuk mewujudkan komitmen kepala daerah dalam mencapai visi dan misi.

- **Strategi 2 adalah :**

Tingkatkan kemampuan sumber daya manusia perencana guna mewujudkan komitmen kepala daerah dalam mencapai visi dan misi.

- **Strategi 3 adalah :**

Tingkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dalam mewujudkan komitmen kepala daerah dalam mencapai visi dan misi daerah.

- **Strategi 4 adalah :**

Tingkatkan ketersediaan data-data hasil pembangunan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan secara kreatif.

#### B. Arah Kebijakan

Sedangkan kebijakan yang dirumuskan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas adalah :

- ***Kebijakan 1 adalah :***

Peningkatan hubungan kerja sama dan koordinasi dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

- ***Kebijakan 2 adalah :***

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perencana dalam mewujudkan komitmen kepala daerah untuk mencapai visi dan misi.

- ***Kebijakan 3 adalah :***

Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dalam mewujudkan komitmen kepala daerah dalam mencapai visi dan misi daerah.

- ***Kebijakan 4 adalah :***

Peningkatan ketersediaan data-data hasil pembangunan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan secara kreatif.

## BAB V

### PROGRAM PRIORITAS & KEGIATAN INDIKATIF

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda untuk jangka waktu lima tahun kedepan secara jelas dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2, namun dapat uraikan secara singkat sebagai berikut :

#### **A. Program/ Kegiatan Bappeda dan Pembiayaan Indikatif**

Pelaksanaan program maupun kegiatan di Bappeda semua pendanaannya berasal dari APBD, sehingga prosentase kenaikan pagu dana untuk setiap program/ kegiatan sangat bergantung kepada APBD tersebut.

Namun untuk setiap tahunnya dalam perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan diperkirakan mengalami peningkatan anggaran sebesar 10% pertahun.

#### **B. Program/ Kegiatan Bappeda dan Target Indikatf**

Sedangkan untuk pelaksanaan program/ kegiatan berdasarkan target indikatif, digunakannya Laporan Akuntabilitas Tahun 2012 serta Laporan Tahun Tahunan Bappeda sebagai patokan dasar dalam menentukan target indikatif untuk lima tahun kedepan dalam penyusunan rencana strtegis ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013- 2017 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang dalam penerapannya dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dengan demikian, berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dapat diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2017. Renstra ini adalah kontrak Kepala Bappeda dengan Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah 5 tahun kedepan (2013 - 2017).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan maka Bappeda sebagai salah satu Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Bappeda tetapi juga bagi segenap pihak- yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Puncak Jaya.



Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Bappeda Kabupaten Puncak Jaya telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Mulia, 2013  
KEPALA BAPPEDA,

**ISAEL MOM, SH. M.Si.**  
NIP. 19721212 199712 1 003

## PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

<b>Faktor Internal</b>          <b>Faktor Eksternal</b>	<p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Puncak Jaya telah terisi dengan staf yang memadai.</li> <li>2. Terjalin hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf</li> </ol>	<p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis</li> <li>2. Belum optimalnya pelaksanaan Monev.</li> </ol>
<p><b><u>Peluang:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan Visi &amp; Misi daerah</li> <li>2. Otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk berprakarsa.</li> </ol>	<p><b>Strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan SDM yang tersedia untuk mengimplementasikan komitmen visi dan misi Kepala Daerah</li> <li>2. <b><i>Tingkatkan kemampuan sumberdaya manusia perencana guna mewujudkan komitmen kepala daerah dalam mencapai visi dan misi</i></b></li> <li>3. <b><i>Tingkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi untuk mewujudkan komitmen pimpinan daerah dalam mencapai visi dan misi daerah</i></b></li> <li>4. Tingkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi untuk meningkatkan kreativitas dan berprakarsa dalam proses perencanaan</li> </ol>	<p><b>Strategi meminimalisir kelemahan untuk menangkap peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalkan data-data pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah</li> <li>2. <b><i>Tingkatkan ketersediaan data-data pembangunan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan secara kreatif</i></b></li> <li>3. <b><i>Tingkatkan Pelaksanaan Monev untuk mewujudkan komitmen Kepala Daerah dalam mencapai Visi dan Misi Daerah</i></b></li> <li>4. Tingkatkan Pelaksanaan Monev untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya</li> </ol>
<p><b><u>Ancaman:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam</li> <li>2. Masih terdapat aparat pemerintah yang belum memahami arti penting proses perencanaan.</li> </ol>	<p><b>Strategi memanfaatkan kekuatan guna mengatasi ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalkan kemampuan SDM yang tersedia untuk menampung aspirasi masyarakat</li> <li>2. Tingkatkan kemampuan SDM yang tersedia untuk lebih memahami arti pentingnya proses perencanaan</li> <li>3. Tingkatkan Hubungan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan proses perencanaan dan menjaring aspirasi masyarakat</li> <li>4. Tingkatkan Hubungan kerjasama dan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya proses perencanaan</li> </ol>	<p><b>Strategi meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalkan data hasil pembangunan dalam menjaring aspirasi masyarakat.</li> <li>2. Optimalkan data hasil pembangunan dalam meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya proses perencanaan</li> <li>3. Optimalkan pelaksanaan Monev untuk menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam</li> <li>4. Optimalkan pelaksanaan Monev untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya dalam proses perencanaan.</li> </ol>

**TABEL : 5.1**  
**PROGRAM/KEGIATAN SKPD & TARGET INDIKATIF**  
**BAPPEDA KABUPATEN PUNCAK JAYA**  
**TAHUN 2013 -2017**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA DASAR INDIKATOR		TARGET INDIKATIF					
			NILAI	TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>I. SEKRETARIAT BAPPEDA</b>										
<b>1. Program Administrasi Perkantoran</b>	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Benda-benda pos	100%	LAKIP 2008	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	
	2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	LAKIP 2008	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	100%	LAKIP 2008	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	LAKIP 2008	13.200.000	14.578.400	15.000.000	15.000.000	15.500.000	
	5. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	100%	LAKIP 2008	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	6. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Tersedianya jasa kesehatan PNS	100%	LAKIP 2011	-	-	-	50.000.000	-	
	7. Penyediaan bahan listrik kantor	Tersedianya alat-alat listrik	100%	LAKIP 2008	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
	8. Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan dan minum kantor	100%	LAKIP 2008	91.200.000	-	-	-	-	
	9. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Terselenggaranya koordinasi	100%	LAKIP 2008	568.500.000	568.500.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
	10. Kunjungan dan monitoring dalam daerah	Terselenggaranya monitoring	100%	LAKIP 2008	259.400.000	259.400.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
	11. Penyediaan jasa perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran	100%	LAKIP 2008	178.100.000	36.400.000	43.446.000	62.800.000	78.948.000	
	12. Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100%	LAKIP	-	75.154.200	75.154.200	75.000.000	70.735.000	
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1. Pemeliharaan Rutin berkala	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	LAKIP 2008	25.000.000	25.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	
	2. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	100%	LAKIP 2008	50.000.000	50.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA DASAR INDIKATOR		TARGET INDIKATIF					
			NILAI	TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017	
		LAKIP 2012								
	3. Publikasi di media cetak dan elektronik	Terselenggaranya publikasi	100%	LAKIP	-	65.000.000	-	-	-	-
	4. Pembangunan Rumah Jabatan Type 80	Tersedianya Rumah Dinas Type 80	100%	LAKIP	-	-	-	873.104.660	-	-
	5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	LAKIP	300.000.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	100%	LAKIP 2012	-	300.000.000	-	300.000.000	-	-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya diklat formal	100%	LAKIP 2012	-	-	-	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	100%	LAKIP 2012	45.105.000	28.600.000	21.554.000	20.000.000	20.050.000	20.050.000
<b>II. BIDANG FISIK DAN PRASARANA</b>										
1. Program Perencanaan Tata Ruang	1. Penataan ibukota Distrik	Tersedianya Dokumen Perencanaan distrik	100%	LAKIP 2012	-	-	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang	100%	LAKIP 2012	1.200.000.000	1.700.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
	2. Penyampaian aspirasi oleh tokoh masyarakat	Terselenggaranya rapat penyampaian aspirasi msy.	100%	LAKIP 2012	1.201.551.100	1.022.615.350	-	-	-	-
	3. Sosialisasi RPJMD	Terselenggaranya sosialisasi RPJMD	100%	LAKIP 2012	200.000.000	-	-	-	-	-
	4. Pendamping program listrik tenaga surya tahun 2008	Tersedianya Tenaga Listrik Tenaga Surya	100%	LAKIP	-	88.800.000	-	-	-	-
	5. Penyusunan RPJMD	Tersedianya Dokumen RPJMD	100%	LAKIP	-	790.340.400	-	-	-	-
	6. Cetak buku RPJMD	Tersedianya Buku RPJMD	100%	LAKIP	-	-	75.000.000	-	-	-

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA DASAR INDIKATOR		TARGET INDIKATIF					
			NILAI	TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>III. BIDANG EKONOMI</b>										
1.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Penyusunan Masterplane Ekonomi Daerah	Tersedianya dokumen Masterplane pembangunan Ekonomi	100%	LAKIP 2012	1.930.030.000	-	-	718.014.000	-
2.	Program Pengembangan data/informasi	1. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya data pembangunan Ekonomi	100%	LAKIP 2012	168.300.000	-	-	-	-
		2. Penyusunan Standar Harga Satuan Untuk pengadaan Barang/Jasa, Harga Satuan Bahan Bangunan dan Uraih	Tersedianya Dokumen Standar Harga Satuan	100%	LAKIP	-	-	-	299.500.000	246.672.840
3.	Program Perencanaan & Identifikasi Sektor Unggulan Serta Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi	1. Penyusunan Rencana Umum	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	LAKIP	634.187.200	-	-	-	-
<b>IV. BIDANG SOSIAL BUDAYA</b>										
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Pemantauan, Pengendalian dan Pelaporan OTSUS TA 2007	Tekendalnya kegiatan	100%	LAKIP 2012	500.000.000	499.600.000	499.600.000	857.890.000	859.890.000
		2. Penyusunan Rancangan RKPDP 2008	Tersedianya Rancangan RKPDP	100%	LAKIP	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		3. Pembuatan MKPP Tahun 2008	Tersedianya MKPP	100%	LAKIP	239.159.000	-	-	-	-
2.	Program Kerjasama dengan UNICEF	1. Kerjasama Kabupaten Puncak Jaya dengan UNICEF	Terselenggaranya kerjasama dengan UNICEF	100%	LAKIP	34.770.000	-	-	-	-
<b>V. BIDANG LITBANG DAN STATISTIK</b>										
1.	Program Pengembangan data dan informasi	1. Sistem informasi data pokok profil kabupaten	Tersedianya Data	100%	LAKIP 2012	-	-	-	750.000.000	-
		2. Penyusunan Puncak Puncak Jaya dalam Angka, PDRB, IKK, IPM	Tersedianya data berbasis kampung	100%	LAKIP 2012	300.000.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA DASAR INDIKATOR		TARGET INDIKATIF						
			NILAI	TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017		
	3.	Pembuatan Sistem Komputerisasi Pelaporan dan pengendalian kegiatan	Tersedianya sistem pelaporan	100%	LAKIP	-	-	362.595.000	-	-	
2.	Program Evaluasi Data Beasiswa di Kota Study	1.	Evaluasi Data Beasiswa di Kota Study	Tersedianya data beasiswa yang akurat	100%	LAKIP	-	-	845.600.000	-	-
		2.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Beasiswa Se-Indonesia	Tersedianya data beasiswa yang akurat	100%	LAKIP	-	-	900.000.000	-	-
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen laporan hasil pembangunan	100%	LAKIP 2012	1.118.440.600	1.385.276.700	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
<b>VI. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>											
1.	Program Pemantauan dan pengelolaan lingkungan	1.	Pembuatan Tempat Sampah dan Pembuangan Akhir Sampah	Tersedianya TPS/TPA	100%	LAKIP	-	-	-	-	116.070.000
		2.	Pendampingan Pembuatan tempat sampah	Tersedianya TPS/TPA	100%	LAKIP	-	-	-	-	116.070.000
2.	Program Pemantauan dan Pengolahan Lingkungan	1.	Perencanaan Pembuatan jamban dan penyehatan lingkungan	Tersedianya Jamban Sehat	100%	LAKIP	-	-	-	-	1.000.000.000
3.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	1.	Sosialisasi tentang pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi tentang LH		LAKIP	-	-	-	287.900.000	-
		2.	Perencanaan Pembuatan jamban dan penyehatan lingkungan Tahap II	Tersedianya Jamban Sehat		LAKIP	-	-	-	53.700.000	
4.	Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.	Koordinasi Penyusunan Masterplane Pengendalian SDA & Lingkungan Hidup.	Tersedianya dokumen masterplane LH		LAKIP	-	-	-	1.000.000.000	-
5.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.	pembangunan talud pencegah erosi taman	Tersedianya Bngunan talud pencegah erosi		LAKIP	2.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )  
(BERDASARKAN PERDA NO 9 TAHUN 2008)**







